

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja lembaga pemerintah kini mendapat perhatian lebih karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan administrasi publik. Kinerja merupakan representasi tingkat pencapaian dalam melaksanakan kegiatan untuk merealisasikan visi dan misi organisasi. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1 yang membahas mengenai Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah hasil atau output yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang dapat diukur dan dinilai. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, n.d.). Sedangkan menurut (Daling, 2013), kinerja adalah gambaran berhasil tidaknya suatu kegiatan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi serta sering dipergunakan dalam menilai pencapaian individu atau kelompok.

Kinerja realisasi anggaran adalah gambaran sejauh mana rencana anggaran suatu organisasi telah dijalankan dan dilaksanakan. Anggaran adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan kegiatan yang direncanakan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana ini biasanya disajikan dalam bentuk data kuantitatif dan bentuk mata uang atau barang. Dalam instansi sektor publik, anggaran berkaitan dengan proses alokasi dana dalam bentuk uang yang berasal dari masyarakat, yang dipergunakan untuk melaksanakan program-program pemerintah (Pida, 2021). Sebagai rencana keuangan, anggaran mencakup beberapa hal, seperti: (1) rencana organisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam memberikan layanan tersebut, (2) perkiraan biaya yang diperlukan untuk mewujudkan rencana tersebut, dan (3) estimasi sumber-sumber pendapatan serta jumlah pendapatan yang akan diperoleh. (Suhaila Lubis, 2021).

Pendekatan *value for money* merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai sejauh mana penggunaan sumber daya finansial mampu

menghasilkan hasil yang sebanding dengan nilai yang diberikan. Pendekatan ini adalah metode yang seringkali digunakan dalam mengukur kinerja sektor publik atau organisasi nirlaba dengan mengevaluasi ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan dampak dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara singkat *value for money* ini memiliki arti nilai terhadap uang, ini menunjukkan bahwa setiap rupiah harus dihargai dengan pantas serta digunakan dengan penuh efisiensi. Dengan demikian, *value for money* adalah prinsip yang digunakan oleh manajemen lembaga sektor publik yang dievaluasi berdasarkan tiga elemen utama, yakni ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018). Dengan menerapkan prinsip *value for money* tersebut, instansi sektor publik mendapat keuntungan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya dana publik sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya secara publik.

Pemerintah Kota Bandung memiliki lembaga teknis bagian Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas untuk mengatur masalah yang berkenaan dengan mengendalikan penduduk dan mengatur urusan keluarga berencana. Lembaga tersebut adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung. Dalam melaksanakan program prioritas nasional tersebut, instansi ini diberikan dana yang berasal dari APBD dan diberikan dukungan dari Dana Alokasi Khusus berupa Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Program tersebut berupaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi remaja dilihat dari masih tingginya angka kelahiran pada remaja dengan usia antara 15-19 tahun, perkawinan usia muda yang masih banyak, dan tingginya tingkat aktivitas seks pranikah di antara sejumlah remaja menyebabkan peningkatan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, pada program ketahanan dan kesejahteraan keluarga belum berjalan dengan optimal karena belum memberikan dampak atau pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB.

Program prioritas itu dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak jangka panjang jika dilakukan pengelolaan keuangan yang baik pula. Di bawah ini terdapat informasi tentang alokasi anggaran beserta realisasi pengeluaran DPPKB

Kota Bandung untuk periode Tahun Anggaran 2021-2023 yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran instansi terkait.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Daerah DPPKB Kota Bandung

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2021	Rp22.253.176.600.00	Rp18.110.718.534.00	81,38%
2022	Rp43.890.928.978.00	Rp35.429.823.905.00	80,72%
2023	Rp52.618.558.278,00	Rp43.138.161.308,00	81,98%

Sumber: Laporan Keuangan DPPKB Kota Bandung

Dari data yang tercantum pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran DPPKB Kota Bandung dari tahun 2021-2023 mengalami kenaikan, namun belum optimal karena sebagian dana yang dialokasikan tidak sepenuhnya terpakai sesuai rencana anggaran yang telah disusun. Pada tahun 2021, anggaran sebesar Rp22.253.176.600.00 terealisasi sebesar Rp18.110.718.534.00 atau senilai 81,38%. Itu berarti pada tahun 2021 anggaran tidak terealisasi sebesar Rp4.142.458.066. Hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yaitu wabah Covid-19 yang terjadi dari tahun 2020-2021 yang tinggi serta karena komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBK yang terdiri dari kelembagaan, kebijakan, perencanaan program, dan penganggaran yang masih lemah.

Pada tahun 2022, realisasi anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya dimana anggaran sebesar Rp43.890.928.978 terealisasi sebesar Rp35.429.823.905,00 atau senilai 80,72%. Faktor utama yang menyebabkan penurunan tersebut dikarenakan terdapat satu indikator yang tidak mencapai target dan disebabkan oleh berubahnya beberapa regulasi secara mendasar karena kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal yang menyebabkan indikator tersebut tidak mencapai target yaitu karena kurangnya sumber daya manusia dilapangan serta proses kegiatan pembinaan pertemuan rutin yang terhambat, DPPKB Kota Bandung belum memiliki aplikasi untuk perhitungan TFR dan jumlah Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kota Bandung, dan belum optimalnya perencanaan DPPKB.

Tahun 2023 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar Rp8.189.734.403 atau sekitar 18.83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan beberapa faktor seperti budaya kerja organisasi, ketepatan perencanaan dan kepatuhan pada kebijakan atau regulasi.

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Program DPPKB

Tahun	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
2021	Program penunjang urusan pemerintah daerah	11.705.318.600,00	9.290.402.213,00	79,4%
	Program pengendalian penduduk	372.634.600,00	336.016.300,00	90,2%
	Program pembinaan keluarga berencana	8.708.048.001,00	7.388.063.622,00	84,84%
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	1.467.175.399,00	1.096.236.399,00	74,72%
2022	Program penunjang urusan pemerintah daerah	14.451.981.543	12.137.586.974	83,99%
	Program pengendalian penduduk	849.881.700	677.991.200	79,77%
	Program pembinaan keluarga berencana	16.026.939.885	13.720.961.231	85,61%
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	12.562.125.850	8.893.284.500	70,79%
2023	Program penunjang urusan pemerintah daerah	15.859.674.318	11.453.958.307	72,22%
	Program pengendalian penduduk	1.258.987.600	1.230.546.650	97,74%
	Program pembinaan keluarga berencana	17.879.985.400	16.227.753.426	90,76%
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	17.619.910.960	14.225.902.925	80,74%

Sumber: LKIP DPPKB Kota Bandung

Dari tabel di atas, terlihat bahwa masih ditemukan angka realisasi yang belum mencapai persentase realisasi senilai 95% atau 100% bahkan masih ditemukan persentase realisasi program di bawah angka 80% sehingga dapat dikatakan belum maksimal. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri No.258/PMK.02 Tahun 2015 yang membahas Prosedur Pemberian Penghargaan dan Penerapan Sanksi terkait Pengelolaan Anggaran Belanja pada Kementerian Negara/Lembaga, dijelaskan bahwa tingkat penyerapan anggaran oleh suatu lembaga pemerintah dalam satu periode seharusnya setidaknya mencapai persentase sebesar 95%. Realisasi penyerapan Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera belum mencapai hasil yang optimal dikarenakan beberapa alasan berikut:

1. Realisasi program kegiatan bantuan operasional KB yang tidak mencapai target seharusnya karena kurangnya partisipasi masyarakat.
2. Realisasi program kegiatan penyuluhan, komunikasi, dan edukasi yang tidak mencapai target seharusnya karena tidak tersedianya infrastruktur dan teknologi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa kinerja realisasi anggaran ini menjadi salah satu hal yang penting dalam sebuah organisasi untuk melihat sejauh mana suatu instansi dapat mengelola keuangannya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Pengukuran Kinerja Realisasi Anggaran Melalui Pendekatan *Value For Money* Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun Anggaran 2021-2023”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Dari analisis masalah yang dibahas dalam latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam salah satu program sehingga tidak mencapai target.

2. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi untuk mendukung pelaksanaan program dengan efektif.
3. Kurangnya kesiapan dalam menghadapi perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program-programnya.
4. Kurang optimalnya perencanaan dan dukungan stakeholders.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja realisasi anggaran DPPKB Kota Bandung Tahun Anggaran 2021-2023 dilihat dari rasio ekonomis?
2. Bagaimana realisasi anggaran DPPKB Kota Bandung Tahun Anggaran 2021-2023 dilihat dari rasio efisiensi?
3. Bagaimana kinerja realisasi anggaran DPPKB Kota Bandung Tahun Anggaran 2021-2023 dilihat dari rasio efektivitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur dan mengetahui kinerja realisasi anggaran DPPKB Kota Bandung Tahun Anggaran 2021-2023 dilihat dari rasio ekonomis.
2. Untuk mengukur dan mengetahui kinerja realisasi anggaran DPPKB Kota Bandung Tahun Anggaran 2021-2023 dilihat dari rasio efisiensi.
3. Untuk mengetahui perbandingan kinerja realisasi anggaran antara DPPKB Kota Bandung Tahun Anggaran 2021-2023 dilihat dari rasio efektivitas.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan berkenaan dengan disiplin Ilmu Administrasi Publik

dalam fokus keuangan sektor publik yang diperoleh sewaktu menjalani perkuliahan. Demikian pula, diharapkan bahwa penelitian akan menjadi sumber referensi yang berguna dan akan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan terkait dengan kinerja realisasi anggaran di organisasi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat bagi DPPKB Kota Bandung serta dapat menjadi masukan, pertimbangan, serta evaluasi sebagai bentuk rekonstruksi dan usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja realisasi anggaran di tahun selanjutnya.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu penulis untuk mendapatkan gelar sarjana (S1). Selanjutnya dengan dilaksanakan penelitian ini, diharapkan penulis dapat mengembangkan pengetahuan serta pemahamannya berkenaan dengan kinerja realisasi anggaran dengan menghitung indikator dalam pendekatan *value for money* yang dilaksanakan oleh instansi terkait yaitu DPPKB Kota Bandung.

c. Bagi Pembaca

Bagi para pembaca diharapkan penelitian ini mampu berfungsi sebagai sumber data dan referensi serta panduan dalam penelitian selanjutnya agar lebih komprehensif dan mendalam, khususnya dalam bidang yang sama yaitu kinerja realisasi anggaran.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini difokuskan pada kinerja realisasi anggaran DPPKB Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan *value for money* dalam mengukur kinerjanya. Maskud dari pengukuran kinerja adalah untuk menilai sejauh mana sebuah lembaga mencapai tingkat prestasi yang telah ditetapkan setelah

menetapkan sasaran pencapaian. Pada akhirnya, pengukuran kinerja realisasi anggaran ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Karena kinerja realisasi anggaran merupakan indikator penting untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas peneglolaan keuangan suatu entitas. Ini juga dapat berperan sebagai panduan bagi para pengambil keputusan, alokasi sumber daya, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

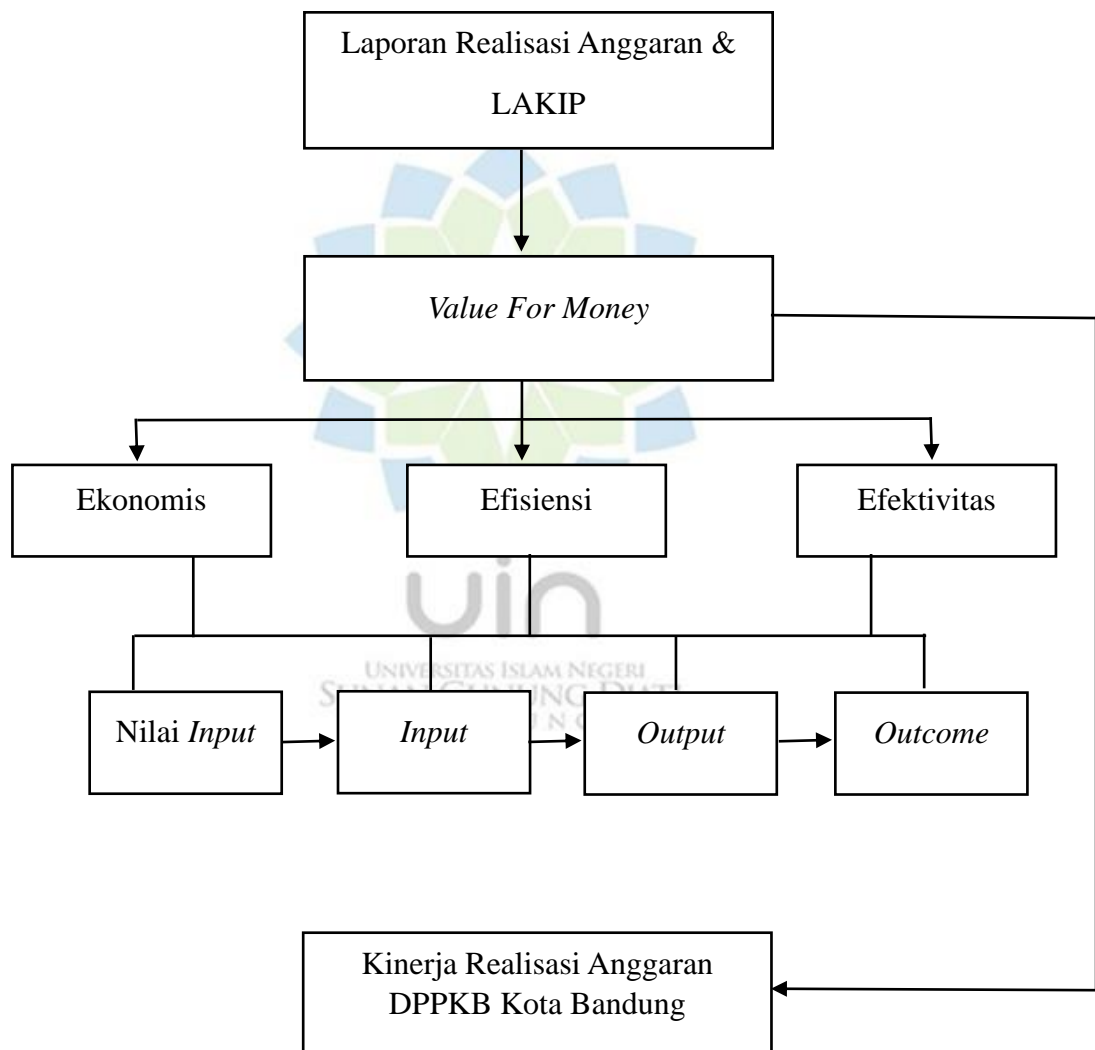
Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam mengevaluasi kinerja realisasi anggaran adalah melalui pendekatan *value for money*. Pendekatan ini merupakan konsep pengelolaan yang bermanfaat bagi instansi sektor publik dan seringkali dianggap seperti esensi dari evaluasi kinerja sektor (Risyandy et al., 2019). Menurutnya, selain hal-hal tersebut *value for money* adalah faktor penting dalam menilai kinerja sektor publik, yang mana kinerja tersebut berkenaan dengan keuangan dan non keuangan juga. Selanjutnya *value for money* ini ditegaskan oleh Mardiasmo yang digunakan untuk melihat penggunaan dana publik dalam organisasi sektor publik harus seimbang dalam artian tidak boleh lebih ataupun kurang.

Menurut (Mardiasmo, 2018), konsep ini berguna untuk mengelola organisasi sektor publik dengan berlandaskan pada tiga indikator yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pendekatan *value for money* yang digunakan untuk mengukur kinerja realisasi anggaran terdiri dari tiga indikator tersebut, dimana ekonomis sering dikenal sebagai upaya untuk menghemat dan mengelola dengan hati-hati serta tidak boros. Efisiensi melibatkan langkah-langkah untuk meminimalkan pemborosan dalam penggunaan sumber daya ekonomis. Sementara itu, efektivitas berkaitan dengan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menetapkan batasan penelitian berikut ini: (1) fokus penelitian ini hanya pada kinerja realisasi anggaran DPPKB Kota Bandung berdasarkan rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, (2) data yang digunakan diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta kuesioner yang diisi oleh pegawai sub bagian keuangan serta pegawai sub bagian program, (3) kuesioner yang diberikan kepada pegawai tersebut digunakan untuk mengukur persepsi mereka serta mendukung hasil analisis *value for money* terhadap kinerja realisasi anggaran dengan tidak melibatkan responden lainnya.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



1.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti menguraikan data dari penelitian terdahulu dengan menggunakan tabel berikut ini :

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	(Fitria, 2022)	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan <i>Value for Money</i> Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara	Kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa: bila dinilai berdasarkan rasio ekonomis telah memenuhi kriteria ekonomis karena pengeluaran masih berada di bawah anggaran belanja. Namun, terdapat penurunan setiap tahunnya karena kerugian dan defisit. Sementara rasio efektivitas menunjukkan kinerja yang efektif karena mencapai sasaran pendapatan yang telah ditetapkan.	Persamaan: Teori penelitian, dan pendekatan penelitian. Perbedaan: Tahun dan lokus penelitian
2	(Hamid et al., 2019)	Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan <i>Value For Money</i>	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa gabungan indikator value for money secara bersama-sama mempengaruhi kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Koefisien determinasi R ² yang diamati adalah 0,701 yang menggambarkan sekitar	Persamaan : Teori dan metode penelitian. Perbedaan : Tahun dan lokus penelitian. Serta berbeda pada teknik analisis data dan bentuk penelitian, dimana penelitian terdahulu berbentuk jurnal.

			70,1% dari variabilitas, sementara sekitar 29,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.	
3	(Komanda, 2021)	Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintahan Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2020	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari aspek ekonomi, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah berhasil mengurangi pengeluaran pada periode tahun anggaran 2016-2020, di tahun 2016 penghematan mencapai 92%, dan tahun anggaran 2017-2018 mencapai 93%. 2. Selama rentang waktu 2016-2020 dalam hal efisiensi penganggaran, data menunjukkan kinerja memuaskan dengan rasio berada pada angka 89%, 82%, dan 84%. Lalu tingkat efisiensi <i>output</i> pada <i>input</i> berturut-turut senilai 83%, 83%, dan 92%. 3. Efektivitas <i>output</i> terhadap target di tahun 2016 tergolong cukup efektif berada pada persentase 67%, sedangkan tahun 2017-2018 persentasenya naik menjadi 93,81% & 92%, tergolong ke dalam kategori efektif karena 	<p>Persamaan :</p> <p>Teori penelitian yang sama.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Tahun penelitian, lokus penelitian dan metode penelitian.</p>

			masuk dalam kisaran 90-100%.	
4	(Ardila & Putri, 2015)	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Penelitian ini dari segi ekonomis menunjukkan peningkatan selama empat tahun terakhir sebesar 102,27%. Dari segi efisiensi tidak memenuhi standar efisien dalam konsep value for money karena berada diatas 100%. Sedangkan dari segi efektivitas telah memenuhi standar sehingga Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama empat tahun terakhir sudah efektif ketika memberikan layanan publik kepada masyarakat.	Persamaa : Teori penelitiannya sama. Perbedaan : Lokus dan tahun penelitiannya berbeda. Selain itu berbeda pada bentuk penelitian, dimana penelitian terdahulu berbentuk jurnal.
5	(Lutfiawan, 2022)	Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Periode 2018-2020	Kinerja keuangan Kecamatan Bogor Selatan pada tahun 2018-2020 berdasarkan hasil pada penelitian ini menunjukkan hasil yang positif dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, uji validitas dan reliabilitas untuk seluruh pernyataan dalam kuesioner menunjukkan hasil bahwa semua pernyataan tersebut valid dan reliabel.	Persamaan: Pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif. Perbedaan : Tahun penelitian, lokus penelitian, teknik analisis data serta teori yang digunakan yaitu teori dari Mahmudi. Serta berbeda pada jenis data dimana penelitian terdahulu menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif.
6	(R. S.	Pengukuran	Hasil penelitian dilihat dari	Persamaan :

	Fauziah, 2023)	Kinerja Keuangan dengan Konsep Value For Money pada Kantor Pertahanan Kota Bandung	dimensi ekonomis melampaui batas kategori ekonomis dengan angka melebihi 100%. Dari dimensi efisiensi berhasil mencapai dibawah 100% yang artinya efisien. Tetapi dari dimensi efektivitas mendapatkan kategori belum efektif jika dilihat dari program pada tahun 2020 dengan memperoleh angka 93,83% yang berarti cukup efektif. Di tahun 2021, terdapat program kegiatan yang dianggap kurang efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 0%.	Persamaannya terletak pada teori penelitian dan tahun penelitian. Perbedaan : Perbedaannya terletak pada lokus penelitian, metode penelitian, dan teknik analisis data.
--	----------------	--	---	---

Sumber : Diolah peneliti

Berdasarkan beberapa referensi dalam tabel tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini dengan enam penelitian sebelumnya mempunyai perbandingan persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut terletak pada pendekatan penelitian yaitu deskriptif kuantitatif dan teori penelitian yaitu teori dari Mardiasmo, namun terdapat perbedaan teori dengan penelitian (Lutfiawan, 2022) karena menggunakan teori dari Mahmudi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus, lokus serta waktu pelaksanaan penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada kinerja realisasi anggaran yang dilakukan di DPPKB Kota Bandung dengan rentan waktu tiga tahun terakhir yaitu 2020-2022. Perbedaan lainnya terletak teknik analisa data lain yang digunakan oleh (Hamid et al., 2019) yaitu teknik analisis regresi linier berganda.